

# DISPUTE RESOLUTION IN ASIA: INDONESIA'S PERSPECTIVE AND PRACTICES

International Law Year in Review 2025  
The United Nations at 80: Reflections and Projections  
CIL-NUS, Singapore, 22 January 2025

---

**Dr. iur. Damos Dumoli Agusman**

Ambassador of the Republic of Indonesia to Austria and  
Slovenia and Permanent Representative to the UN and  
other IOs in Vienna



# SOVEREIGNTY RELATED DISPUTES

---

TITLE TO MARITIME FEATURES

LAND/MARITIME DELIMITATION

LEGAL ENFORCEMENT IN UNDELIMITED LANDS/WATERS

OTHERS



# REGIONAL ATTITUDE 'ASEAN WAY?'

- PUT ASIDE DIFFERENCES AND GO  
'COOPERATION',
  - 'NOT IN MY TIME?'
- TONE DOWN THE DISPUTE
- PROCEDURE: VOLUNTARY OVER COMPULSORY

**NEGOTIATION IS PREFERABLE**



# UNCLOS 1982

## Article 298 Exception

THE PARTIES MAY DECLARE SO:

- HISTORIC BAYS OR TITLES
- MARITIME DELIMITATION
- MILITARY ACTIVITIES

- ✓ Australia (2002)
- ✓ South Korea (2006)
- ✓ China (2006)
- ✓ Thailand (2011)
- ✓ Singapore (2018)
- ✓ Malaysia (2019)
- ✓ Indonesia (2024)
- ✓ Next?

# Indonesia's 'dna'

## AGAINST COMPULSORY DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM

No declaration on ICJ Compulsory  
Jurisdiction (art. 36 Para. 2 ICJ  
Statute)



## INDONESIA'S PRACTICE ON COMPULSORY JURISDICTION

HUMAN RIGHTS TREATIES  
(CERD, CEDAW, CAT)  
1980s

**Reservation to ICJ**

But.....was...

- Indonesia – Thailand Treaty of Friendship 1954
- Indonesia–the Philippines Treaty of Friendship 1951

**Optional clause referred to ICJ**



# DISPUTES OVER TITLE TO TERRITORY DILEMMA ON CHOICE OF MODES

---

## ❑ 'MOST UNLIKELY' SOLVED THROUGH BILATERAL NEGOTIATIONS

- Absolutist positions: 'no negotiation on sovereignty'
- Negotiation is only best for exchanging and clarifying the respective claims

## ❑ IMPOSSIBILITY OF NEGOTIATION VS PROHIBITION OF USE OF FORCE VS RELUCTANT TO ENGAGE THIRD PARTY



# THE TREND MODELS

KEEP IT UNRESOLVED

JOINT DEVELOPMENT?

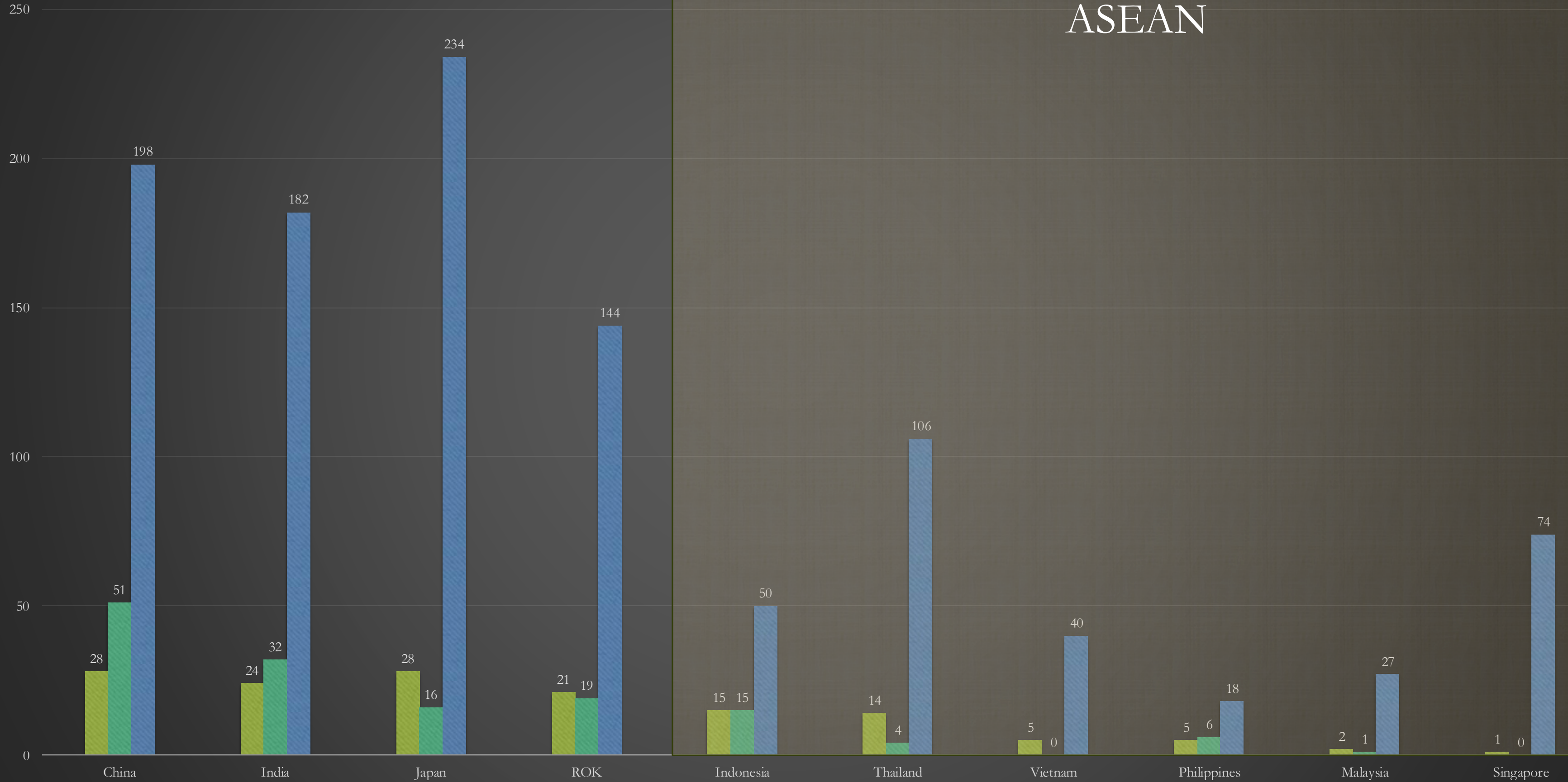
NEGOTIATION-CONCILIATION-  
MEDIATION

THIRD PARTY SETTLEMENT OF  
DISPUTE (EXCEPTIONAL)



# WTO Cases of 2025

■ Complainant ■ Respondent ■ Third Party



ASEAN



# COMMON TREND





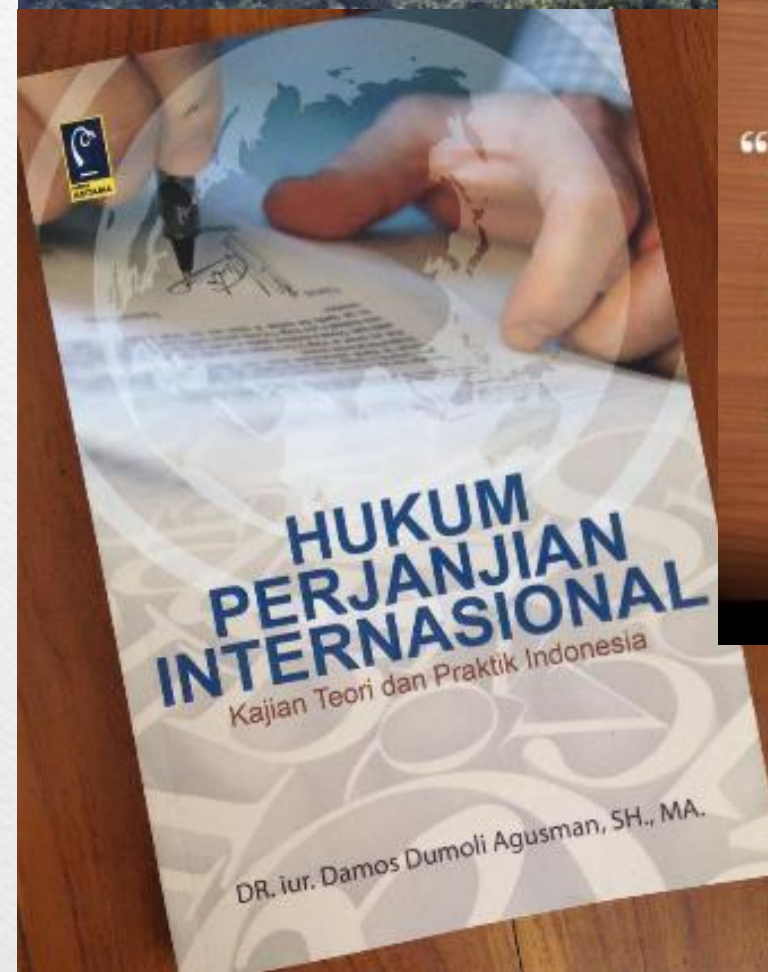
# OBSERVATION

---

- ❑ MODEL OF 'DIRECT NEGOTIATION' IS STILL PREVAILING
- ❑ INCREASING USE OF THIRD PARTY MODEL FOR LESS POLITICAL DISPUTES.
- ❑ RESORT TO USE OF FORCE HAS BEEN OBSOLETE



# THANK YOU



“Treaties as agreements between Indonesia and other states are not unfamiliar to Indonesian legislation. Some relevant laws or statutes, government and presidential regulations have already made references to and identified treaties with various purposes. There are a number of legislations quoting treaty provisions for procedural purposes by acknowledging the legal effect of their provisions in relation to the application of the respective laws. Some legislation go even further, creating a legal basis for a direct application of the provisions of the treaties. Another group of legislation uses treaties for substantive purposes, by not quoting the treaties in a formal way but directly copying their provisions into legislation formula.”



## INDONESIA DALAM DINAMIKA HUKUM INTERNASIONAL

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia aktif dalam pergaulan internasional yang tidak jarang melahirkan implikasi yang terkait dengan hukum internasional. Buku ini memuat berbagai isu hukum internasional kontemporer yang pada umumnya dihadapi oleh Indonesia pada periode 30 terakhir ini yang telah dipublikasikan melalui berbagai media masa.

Buku ini adalah serpihan-serpihan yang membentuk catatan utuh dan penting dalam menggambarkan kiprah Indonesia dalam menyikapi isu hukum internasional. Mengingat catatan-catatan ini ditulis langsung oleh pelaku pengambilan kebijakan Kemenlu RI di bidang hukum internasional maka oentifikasi dan keabsahannya memberikan nilai lebih dalam menggambarkan kebijakan Indonesia di bidang ini.

Buku ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, serta para pemerhati dan praktisi hukum di Indonesia yang hendak mendalami kebijakan Indonesia di bidang hukum internasional.

Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, SH, MA adalah pejabat karir di Kementerian Luar Negeri yang mengukuli bidang hukum internasional sejak awal karir diplomasinya sampai ke puncak jabatan tertinggi di bidang ini, yaitu sebagai Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional pada Kementerian Luar Negeri RI.

Selain sebagai pejabat tinggi pemerintah, Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, SH, MA juga sebagai Dosen Pengajar di Fakultas Hukum UNPAD Bandung dan telah menulis berbagai buku yang terkait dengan hukum internasional.

Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, SH, MA akan bertugas sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan Slovenia sekaligus Wakil Tetap RI untuk PBB yang berkedudukan di Kota Wina, Austria.

**KENI MEDIA**  
Jl. Sekeloa Timur No. 8 Bandung 40175  
Phone (022) 731 5635 Fax (022) 8734 0715  
kenimedia@ yahoo.com  
www.kenimedia.id  
Shopee: <https://id.shopee.com/>

